

Peran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Meningkatkan Perolehan Suara Pemilu 2024 di Sumatera Utara

Munawar Kholil Nur
UIN Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis: kholilnurm@gmail.com

Abstract. *Indonesia as a democratic state cannot be separated from the concept of the rule of law, because the two complement each other. Democracy is a tool to control the rule of law, as reflected in the principles of democratische rechtsstaat and constitutional democracy. In this context, political parties such as the National Awakening Party (PKB) of North Sumatra play an important role as a link between the community and the government. Through elections, political parties carry candidates for leaders chosen by the people, making them a key element in realizing people's sovereignty and creating a just society in a democratic system. Data were collected through interviews, observation and documentation to summarize the role of the National Awakening Party in increasing electoral participation in the North Sumatra region. This data reduction can be understood as selecting, focusing on the data that has been selected, and producing a clear picture, and making it easier for researchers to collect data. Data presentation is the next step taken by researchers after they have completed the data reduction process. The purpose of the display is to convey categories or topics that have been sorted through the data reduction process into connection patterns. Based on the results of the study, it can be concluded that the role of the DPW of the National Awakening Party (PKB) of Medan City in encouraging community participation is still not fully in line with the provisions contained in Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties, political education carried out is more focused on cadres while political education in the community has not been implemented and is focused on education for cadres and socialization related to money politics in the community.*

Keywords: Role, PKB, PEMILU

Abstrak. Indonesia sebagai negara demokratis tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum, karena keduanya saling melengkapi. Demokrasi menjadi alat untuk mengontrol negara hukum, sebagaimana tercermin dalam prinsip *democratische rechtsstaat* dan *constitutional democracy*. Dalam konteks ini, partai politik seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara berperan penting sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Melalui pemilu, partai politik mengusung calon pemimpin yang dipilih rakyat, menjadikannya elemen kunci dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan menciptakan masyarakat yang adil dalam sistem demokrasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk

merangkum peran partai kebangkitan nasional dalam meningkatkan partisipasi pemilu di wilayah Sumatera Utara. Reduksi data ini dapat dipahami sebagai menyeleksi, memusatkan perhatian pada data yang telah diseleksi, dan menghasilkan gambaran yang jelas, serta mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data. Penyajian data merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti setelah mereka menyelesaikan proses reduksi data. Tujuan dari tampilan adalah untuk menyampaikan kategori atau topik yang telah diurutkan melalui proses reduksi data menjadi pola koneksi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Medan dalam mendorong partisipasi masyarakat masih belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik., Pendidikan politik yang dilakukan lebih terfokus kepada kader sedangkan pendidikan politik pada masyarakat belum terlaksana dan yang terfokus pada pendidikan pada kader serta sosialisasi terkait money politik pada masyarakat.

Kata Kunci: Peran, PKB, PEMILU

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara demokrasi tak bisa dilepaskan dari konsep negara hukum karena negara hukum justru merupakan ciri pokok demokrasi, sementara sistem demokrasi menjadi pengaman utama bagi tegaknya aturan hukum. Inilah yang melahirkan gagasan *demokratische rechtsstaat* (negara hukum yang demokratis) dan *constitutional democracy* (negara demokrasi berdasarkan hukum) (Asshiddiqie, 2005).

Di era modern, demokrasi dianggap paling cocok untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan, sebab ia menegakkan prinsip kedaulatan rakyat dengan melibatkan warga negara secara penuh dalam perumusan hingga pengambilan kebijakan. Meski begitu, kenyataannya selalu terdapat jarak antara masyarakat dan penyelenggara negara jarak yang mengingatkan kita akan tantangan menjaga agar suara rakyat benar-benar terwakili (Asshidqie, 2006).

Demokrasi membutuhkan rangkaian organisasi dan mekanisme agar aspirasi rakyat benar-benar tersalurkan; tanpa itu, kedaulatan rakyat bisa berubah menjadi kosong atau bahkan cenderung otoriter. Di sinilah peran partai politik menjadi krusial. Istilah “partai” sendiri berasal dari bahasa Prancis *partager*, yang berarti membagi-bagi, dan dalam bahasa Inggris serumpun dengan “partaking”, yakni menjalin kerjasama serta mendorong partisipasi.

Jadi Dengan demikian, partai politik bisa dipahami sebagai wadah yang dirancang untuk memengaruhi kebijakan publik sesuai prinsip dan ideologi tertentu, baik melalui

pengorganisasian kekuasaan maupun keterlibatan langsung warga. Keikutsertaan masyarakat dalam pemilu, penyusunan kebijakan, dan proses demokrasi lainnya adalah tolok ukur sejatinya keberhasilan sistem demokrasi di Indonesia (Pamungkas, 2019).

Partai politik merupakan peserta aktif dalam pemilihan umum, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) wilayah sumatra utara. Dalam pemilu, partai politik mengajukan calonnya, yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Status dan fungsi partai politik sangat menentukan. Kelompok tersebut mengemban fungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Peran Partai politik terutama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dianggap penting untuk mencapai masyarakat yang adil dan sukses dalam periode demokrasi masa kini. Pemerintah Indonesia adalah salah satu dari beberapa di dunia yang beroperasi dalam kerangka demokrasi. agar partai politik dipandang penting untuk mewujudkan paham kedaulatan rakyat (Fadjar, 2012).

Di era demokrasi modern, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hadir sebagai kekuatan politik yang berkomitmen membangun tata kehidupan berbangsa yang lebih makmur dan berkeadilan. Keberadaan partai politik identik dengan kemampuan untuk berserikat dan menyampaikan pendapatnya di bawah pemerintahan yang demokratis (Firmasyah, 2011). Anggota partai politik dapat dilihat sebagai komunitas yang dipersatukan latar belakang bersama dan seperangkat keyakinan idiologi yang mereka anut, Untuk mengimplementasikan agenda mereka, mereka perlu mengamankan posisi kekuatan dan pengaruh politik.

Sesuai dengan Ayat 1 Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Ketika tingkat partisipan pemilu jatuh baik di antara yang muda atau yang tua dalam pemilu Indonesia, Peran partai kebangkitan bangsa (PKB) wilayah Sumatra utara harus mampu menawarkan dirinya sebagai suara penuntun. Agar tingkat partisipasi pemilu di wilayah Sumatra utara terus meningkat, dengan ini

Peran partai politik PKB dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang jika dijalankan secara konsisten akan meningkatkan minat dan keterlibatan warga negara Sumatra utara dalam politik dan proses pemilu. Hal ini Bertujuan untuk mendorong lebih banyak orang yang berpartisipasi dalam pemilu (Budiarjo, 2013).

Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019 di wilayah Sumatera Utara. Pada tanggal 17 April 2019, rakyat Sumatera Utara berpartisipasi dalam

pemilihan umum serentak dengan persentase 79,91 persen, Jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 77,5 persen, angka ini cukup baik.

Kenaikan partisipan tersebut tentunya tidak lepas dari pada peran Partai kebangkitan bangsa (PKB) wilayah Sumatra utara, karena pastinya selain dari pada fokus untuk memenangkan kader potensialnya di wilayah Sumatra utara, sudah pasti Partai kebangkitan bangsa melaksanakan beberapa langkah strategis dalam meningkatkan partisipan pemilu di wilayah Sumatra utara, hal tersebut sudah terbukti dengan data kenaikan partisipan pemilu yang notebanya melampaui target nasional di wilayah Sumatra utara, dengan ini peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Peran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Meningkatkan Perolehan Suara Pemilu 2024 “

METODE PENELITIAN

Metode penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian kualitatif ini. Pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat adalah inti dari teknik deskriptif, menurut Whitney dalam Moh. Nazir. Studi tentang interaksi, aktivitas, sikap, sudut pandang, proses yang berkelanjutan, dan dampak dari suatu fenomena semuanya merupakan permainan yang adil untuk penelitian deskriptif, seperti isu-isu dalam masyarakat dan metode yang berlaku dalam kelompok dan lokal tertentu (Nazir, 2003). Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan multi-metode yang meliputi teknik observasi, wawancara mendalam, serta kajian dokumen untuk memperoleh data yang komprehensif. Penelitian ini menerapkan analisis data kualitatif dengan pendekatan induktif, di mana temuan penelitian dikembangkan secara organik dari data yang terkumpul. Secara metodologis, peneliti mengadopsi model analisis interaktif Miles dan Huberman yang melibatkan tiga komponen utama: Data reduksi (*Data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan. Berkenaan dengan penelitian ini, untuk memverifikasi kebenaran data sehingga informasi yang diperoleh dapat diandalkan, dan untuk memperoleh signifikansi langsung dari kegiatan yang terdiri dari penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metodologi yang dikenal dengan triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara dalam Meningkatkan Peserta PEMILU 2024

Pemilihan umum menjadi tulang punggung demokrasi di banyak negara, termasuk Indonesia yang masyarakatnya majemuk. Melalui mekanisme pemungutan suara, beragam harapan dan aspirasi kelompok—dari kecil hingga besar—bisa terakomodasi, sehingga tujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera dan berkeadilan dapat lebih mudah diraih. Khususnya dalam Pemilu Serentak 2024, diharapkan semua warga memperoleh kebebasan berekspresi dan akses penuh atas hak-hak politiknya, sekaligus memperkuat fondasi pemerintahan representatif yang responsif terhadap kebutuhan publik.

Kesadaran politik warga negara merupakan kunci dalam mendorong partisipasi mereka. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban sipil, hingga kesadaran akan pentingnya terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan publik. Tingkat literasi politik yang tinggi akan mendorong masyarakat lebih aktif dalam berbagai kegiatan demokrasi, dari sosialisasi kebijakan hingga aksi kolektif yang konstruktif.

Partisipasi politik sendiri meliputi segala upaya warga untuk mempengaruhi atau merumuskan kebijakan—baik sebelum kebijakan ditetapkan maupun setelahnya. Contohnya, di Sumatera Utara, perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melonjak dari 92.217 suara pada Pemilu 2014 menjadi 109.001 suara pada 2019, naik 16.784 suara. Pencapaian ini tak lepas dari kerja keras partai dalam mengajak masyarakat terlibat aktif, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, meski sempat menghadapi tantangan hadirnya krisis kepercayaan publik pasca terungkapnya kasus korupsi di DPRD Kota Medan pada 2018.

Sebaliknya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Medan mengalami penurunan signifikan, dari 23.273 suara dan tiga kursi legislatif pada 2014, merosot menjadi hanya 11.596 suara tanpa satupun kursi pada Pemilu Serentak 2019. Fenomena ini menggambarkan bagaimana kepercayaan publik yang terkikis dapat langsung berimbas pada performa partai dalam merebut dukungan rakyat.

Sekretaris PDI Perjuangan, Bapak Eko, menuturkan bahwa “pasca-tsunami politik, kami sempat terpukul secara psikologis, tapi setelah enam sampai tujuh bulan

berkampanye di lapangan, optimisme kembali muncul berkat respons positif masyarakat.” PKB pun menerapkan strategi serupa: turun langsung ke basis pemilih, menyebarluaskan logo di berbagai titik, dan melibatkan tokoh publik agar kepercayaan warga pulih serta partisipasi politik kembali meningkat

Dua faktor utama yang menentukan tingkat partisipasi politik adalah kesadaran politik warga dan kepercayaan mereka terhadap pemerintah (atau sistem politik) yang berjalan, yaitu (Arfani, 2008):

1. Kesadaran politik mengacu pada pemahaman seseorang tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Ini mencakup pengetahuan dan minat individu terhadap kondisi sosial serta dinamika politik di sekitarnya.
2. Sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah mencerminkan sejauh mana seseorang menilai pemerintah dapat diandalkan dan responsif terhadap aspirasi warga. Dalam konteks ini, peran partai politik—terutama PKB di Kota Medan—sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik yang sempat terkikis akibat gelombang korupsi, yang telah membuat sebagian masyarakat bersikap apatis (Rosyida, 2003).

Menurut Bapak Mahendra, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi PKB, partai politik memiliki tugas utama memberi pendidikan politik kepada masyarakat. PKB gencar mensosialisasikan visi dan misi partai sebagai upaya menyampaikan informasi, mengajak warga, dan menyadarkan mereka akan hak serta kewajibannya untuk terlibat dalam Pemilu 2024.

Upaya memberikan bekal politik ini penting agar setiap warga memahami peran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa pendidikan politik yang memadai, kesadaran warga bisa rendah, sehingga partisipasi dalam proses demokrasi menjadi setengah hati atau bahkan menghilang sama sekali.

Pernyataan Mahendra diperkuat oleh Bapak Ir. Losomena, anggota PKB, yang menegaskan bahwa pendidikan politik adalah kewajiban partai. Ia mencontohkan kasus di Kota Malang: ketika masyarakat benar-benar paham seluk-beluk politik, mereka tidak akan mudah apatis meski terjadi skandal, malah cenderung lebih aktif memastikan peristiwa serupa tidak terulang.

Menurut Ketua PDI Perjuangan, kunci pendidikan politik efektif terletak pada pengaktifan struktur partai dari akar rumput hingga pusat. Mulai dari DPC PKB Sumut, lalu PAC, ranting, hingga anak ranting, semua harus digerakkan. Setelah mendapatkan

pembekalan, kader-kader partai turun langsung ke masyarakat untuk menyampaikan visi-misi, seperti tekad “berjuang demi kesejahteraan rakyat”.

Hal ini sejalan dengan penjelasan Ketua DPW PKB Sumut, yang menyatakan bahwa prioritas pertama adalah menggerakkan kembali struktur partai, lalu memberikan pendidikan politik kepada para kader. Dengan fondasi yang kuat, kader menjadi ujung tombak dalam meyakinkan warga akan arah dan tujuan PKB saat berinteraksi langsung di lapangan.

Di Medan, pola pendidikan politik PKB menitikberatkan pada pembekalan kader terlebih dahulu. Setelah memahami dan menguasai materi, kader inilah yang kemudian menjangkau dan membimbing masyarakat secara lebih masif, memastikan pesan partai tersampaikan dengan efektif.

Fokus utama upaya ini adalah meningkatkan partisipasi publik. Kenaikan perolehan suara bukan sekadar angka, melainkan cerminan kerja keras kader yang terus melakukan sosialisasi—termasuk kampanye melawan politik uang—agar warga paham bahaya praktik tersebut dan termotivasi berpartisipasi dengan bersih.

Dengan strategi membangun struktur partai yang solid, mendidik kader, lalu meneruskan edukasi ke masyarakat, PKB berupaya memastikan setiap warga tidak hanya datang ke bilik suara, tetapi juga paham alasan memilih, hak yang sedang dijalankan, dan pentingnya menjaga integritas proses demokrasi.

"Bapak Hariyanto, anggota PKB, menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan edukasi politik kepada masyarakat, terutama terkait bahaya praktik politik uang. Ia menekankan bahwa fenomena politik uang masih marak terjadi, sehingga penting bagi masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang benar. Tujuannya agar masyarakat tidak memilih calon wakil rakyat semata karena iming-iming uang, melainkan berdasarkan rekam jejak dan kualitas calon tersebut."

Pendidikan politik merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan orientasi politik dalam diri seseorang. Orientasi ini mencakup keyakinan, pandangan, serta nilai-nilai yang berkaitan dengan politik, termasuk loyalitas, emosi politik, dan pemahaman terhadap isu-isu politik. Dengan adanya pendidikan politik, individu diharapkan memiliki kesadaran politik yang baik serta sikap yang tepat dalam merespons persoalan politik. Selain itu, pendidikan ini bertujuan agar setiap orang dapat berperan aktif dalam kehidupan politik di tengah masyarakat. Karena itu, pendidikan politik idealnya berlangsung seumur hidup dan hanya dapat

terlaksana secara menyeluruh dalam lingkungan masyarakat yang menjunjung tinggi kebebasan.

Partai politik memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menegaskan bahwa partai politik berperan sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota maupun masyarakat secara luas. Tujuan utamanya adalah membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui peran ini, partai politik diharapkan mampu menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan berkelanjutan, terutama dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Ketika partai politik menjalankan fungsi pendidikannya secara optimal, baik berdasarkan ketentuan undang-undang maupun menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat di daerahnya, maka dampaknya dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterlibatan dalam proses politik, partai politik tidak hanya menjadi alat perjuangan kekuasaan, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan demokrasi. Oleh karena itu, keberadaan dan peran aktif partai politik sangat diperlukan dalam menyelenggarakan pendidikan politik yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, sosialisasi politik menjadi bagian integral dari proses pendidikan politik itu sendiri. Sosialisasi politik merupakan serangkaian aktivitas yang memberikan pengalaman, pengetahuan, serta nilai-nilai dan orientasi politik kepada individu, yang pada akhirnya membentuk kesiapan untuk terlibat dalam kehidupan politik. Tingkat partisipasi yang terbentuk bisa bervariasi, tergantung pada pemahaman dan pengalaman politik masing-masing individu sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, sosialisasi politik memainkan peran strategis dalam membangun budaya politik yang aktif dan bertanggung jawab.

Secara umum, sosialisasi politik mencakup segala bentuk usaha yang dilakukan secara terus-menerus, baik melalui jalur formal seperti pendidikan dan pelatihan, maupun secara informal melalui kegiatan kemasyarakatan. Tujuan utamanya adalah membentuk kesadaran politik masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Melalui proses ini, diharapkan masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sosialisasi politik yang

konsisten dan berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang melek politik dan aktif dalam pengambilan keputusan publik.

Dalam wawancara dengan Bapak Ir. Losomena selaku Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), beliau mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi partainya dalam menjalankan fungsi pendidikan politik. Menurutnya, maraknya kasus korupsi yang melibatkan elit politik telah menimbulkan stigma negatif dan apatisme di tengah masyarakat terhadap partai politik maupun calon legislatif. Kondisi ini diperparah oleh situasi pasca bencana seperti “tsunami politik” yang menyebabkan proses sosialisasi semakin berat. Oleh karena itu, PKB mengambil pendekatan langsung dengan mendatangi masyarakat secara personal, melalui metode door to door atau blusukan ke rumah-rumah warga untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap partai dan para kadernya.

Lebih lanjut, strategi yang dilakukan oleh partai tidak hanya berfokus pada kampanye politik semata, melainkan juga pada bentuk-bentuk pelayanan sosial yang nyata. Misalnya, membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan melalui BPJS bagi warga kurang mampu, serta mendukung akses pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar anak-anak bisa bersekolah tanpa biaya. Selain itu, pemberdayaan perempuan melalui kegiatan ibu-ibu PKK juga menjadi bagian dari upaya menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Meski tantangan cukup besar, partai tetap optimis bahwa dengan pendekatan yang humanis dan solutif, kepercayaan serta partisipasi masyarakat dalam proses politik akan tumbuh secara bertahap dan berkelanjutan (Fuady, 2020).

Pendidikan politik berperan sebagai salah satu pendorong utama dalam meningkatkan partisipasi politik. Peranannya sangat krusial bagi masyarakat, antara lain dalam hal-hal berikut:

a. Menumbuhkan kepribadian politik

Kepribadian politik merupakan sasaran utama dalam proses pendidikan politik. Tidak mungkin terbentuk kesadaran politik tanpa adanya unsur kepribadian politik di dalamnya. Jenis dan tingkat partisipasi politik seseorang sangat dipengaruhi oleh budaya politik yang membentuk karakter politik tersebut. Upaya pembentukan kepribadian politik dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan tidak langsung

Pendekatan ini diwujudkan melalui pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) kepada kader-kader partai, dengan tujuan agar mereka memiliki pemahaman yang sejalan dengan ideologi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta memiliki keterkaitan dengan ilmu ketatanegaraan dan ilmu sosial kemasyarakatan.

2) Pendekatan langsung

Pendekatan ini berupa pengajaran langsung kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, khususnya dalam hal partisipasi pada pemilihan umum.

b. Menumbuhkan kesadaran politik

Kesadaran politik merujuk pada tingkat pengetahuan dan pemahaman individu terhadap hal-hal yang berkaitan dengan politik. Untuk membangkitkan kesadaran politik ini, dapat ditempuh melalui dua metode utama, yaitu dialog dan pengajaran secara instruktif. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menerapkan metode dialog dengan mendatangi masyarakat secara langsung ke rumah-rumah. Dalam kegiatan tersebut, mereka melakukan sosialisasi sekaligus memberikan edukasi, arahan, serta pemahaman mengenai ideologi partai kepada warga.

c. Partisipasi politik

Partisipasi Partisipasi politik masyarakat akan tercermin dari keterlibatan sukarela individu dalam pelaksanaan pemilihan umum, termasuk dalam konteks Pemilu 2024 di Kota Medan. Partisipasi ini tidak hanya bermakna memberikan suara saat pemilihan, namun juga mencakup kesadaran dan kepedulian terhadap proses politik secara menyeluruh. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran politik yang baik, yang tentunya dipengaruhi oleh pendidikan politik yang diterima.

Namun demikian, masih terdapat pandangan kritis dari masyarakat terkait minimnya peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik secara konsisten. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Lukman, seorang warga Kota Medan, bahwa partai politik hanya aktif mendekati masyarakat saat momentum pemilihan umum dengan kegiatan kampanye. Menurutnya, kehadiran partai politik sebatas membagikan brosur tanpa ada usaha serius dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat di tingkat kelurahan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Bambang, yang menyatakan bahwa:

“Di wilayah tempat tinggalnya tidak pernah ada kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik. Menurutnya, partai hanya muncul ketika masa kampanye tiba dengan ajakan memilih, tanpa memberi edukasi politik yang menyeluruh. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat terpaksa mengandalkan kesadaran diri sendiri dalam menentukan pilihan politiknya tanpa bimbingan yang memadai dari partai.”

Pendidikan politik sejatinya merupakan instrumen penting dalam perjuangan politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Sumatera Utara. Melalui pendidikan ini, masyarakat diharapkan memahami fungsi, peran, hak, dan kewajibannya sebagai warga negara dalam sistem demokrasi. Peningkatan kesadaran politik masyarakat sangat dibutuhkan agar tercipta sistem politik yang lebih terbuka dan partisipatif. Tanpa adanya pendidikan politik yang memadai, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik akan melemah dan berdampak pada rendahnya partisipasi politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, khususnya pada Pasal 10 ayat (2), menegaskan bahwa salah satu tujuan khusus partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan anggotanya dalam kegiatan politik serta pemerintahan. Dalam hal ini, DPW PKB Sumatera Utara menjalankan perannya melalui pendidikan politik yang dilaksanakan mulai dari tingkat cabang hingga anak ranting. Kegiatan ini dilakukan dengan terjun langsung ke tengah masyarakat untuk memberikan pengarahannya serta memperkenalkan visi dan misi partai, sehingga keberadaan PKB lebih dikenal dan dipahami masyarakat.

Namun, pola pendidikan politik yang dilakukan oleh PKB selama ini cenderung lebih terfokus pada internal partai, yakni kepada para kader dan pengurus. Pendidikan politik yang menyasar masyarakat umum masih kurang mendapat perhatian. Kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan pemahaman antara kader partai dan masyarakat luas, yang pada akhirnya berdampak pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik. Padahal, menjangkau masyarakat secara langsung melalui pendidikan politik merupakan langkah strategis untuk memperkuat basis pemilih dan meningkatkan citra partai di mata publik.

Dalam rangka menghadapi Pemilu 2024, PKB menunjukkan keseriusannya dengan mempersiapkan para calon anggota legislatif melalui proses seleksi yang ketat, yakni uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*). Sebanyak 969 bakal

calon anggota legislatif mengikuti proses seleksi ini, namun hanya 580 orang yang akan dipilih untuk didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan target meraih 100 kursi dari total 580 kursi DPR RI yang tersedia, PKB menekankan pentingnya kualitas calon yang diusung agar mampu merepresentasikan suara rakyat dan menjalankan fungsi legislasi dengan baik.

Adapun PKB pada Pemilu 2024 menargetkan mendapatkan 100 kursi di DPR. Saat ini, PKB memiliki 58 kursi di DPR RI. Target itu mencapai hampir 100 persen jika dibandingkan perolehan saat ini. Selain sukses dalam pemilihan legislatif, PKB juga ingin sukses pada penyelenggaraan pilkada serentak 2024.

Tak hanya diuji kepatutan dan kelayakannya sebelum mendaftar sebagai caleg, PKB juga sudah bekerja sama dengan konsultan politik Polmark. Polmark yang dipimpin Eep Syaefullah Fatah itu akan melakukan beberapa kali survei untuk menghasilkan peta zona prioritas yang bisa digarap para caleg. Pemetaan dibutuhkan di antaranya untuk menyebar alat peraga kampanye agar lebih efektif.

Salah satu calon legislatif DPRD Provinsi dari PKB, Ibu Fatimah Pohan, S.E, MM., mengungkapkan, sejak akhir tahun 2022, parpol sudah mulai melakukan penjarangan dini bakal calon legislatif DPR RI. Dari kebutuhan 580 calon anggota legislatif yang akan disebar di berbagai daerah pemilihan, ada 969 bakal calon legislatif yang mendaftar. Mereka akan diuji kepatutan dan kelayakan agar teruji kemampuannya. Ada 15 orang penguji yang berasal dari kalangan jurnalis, ulama atau kiai, akademisi, ataupun organisasi masyarakat sipil.

"PKB mengundang penguji dari luar agar melalui saringan terbuka dan ketat, tidak melalui kroni-kronian. Semua terbuka," kata Ibu Fatimah

Selain itu, untuk kebutuhan DPRD provinsi dari kebutuhan 2.700 bakal calon legislatif, sebanyak 2.500 bakal calon sudah mendaftar secara online. Adapun untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan, jumlahnya 19.742 orang.

Setelah para bakal calon ini lolos uji kepatutan dan kelayakan, Dewan Pimpinan Pusat PKB akan mendaftarkan para calon ke KPU. Jadwal pendaftaran calon itu dimulai pada 24 Maret hingga 24 April 2023. *"Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB mendapatkan mandat untuk menyukseskan Pemilu 2024 sesuai agenda dan jadwal. Sebab, masih ada juga yang ingin menunda Pemilu 2024 ini. Namun, PKB sudah siap,"* kata Ibu Fatimah.

Tak kalah penting, mereka juga harus memiliki rekam jejak yang baik. Uji kepatutan dan kelayakan di internal parpol itu diharapkan dapat dilaksanakan setransparan mungkin. Dengan demikian, calon yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi, misalnya, seharusnya tidak diloloskan.

"Pemilu ke depan akan semakin kompetitif, parpol memang harus merancang strategi elektoral yang responsif pada kebijakan isu di masa depan. Seleksi yang ketat bagus untuk mendapatkan calon anggota legislatif yang berkualitas,"

Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan PEMILU yang Aspiratif dan Demokratis

Salah satu bentuk pelibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum (pemilu). Pemilu menjadi sarana yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Saat demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan suatu negara. Pemilu berfungsi untuk menghasilkan kepemimpinan yang mencerminkan kehendak rakyat. Sebagai sarana legitimasi kekuasaan, pemilu adalah mekanisme yang menggambarkan keterlibatan rakyat dalam penentuan masa depan politik mereka.

Pemilu dapat dianggap aspiratif dan demokratis jika memenuhi beberapa persyaratan dasar. Salah satu persyaratan pertama adalah bahwa pemilu harus bersifat kompetitif. Dalam konteks ini, peserta pemilu, termasuk partai politik dan calon pemimpin, harus memiliki kebebasan untuk berpartisipasi tanpa adanya hambatan atau intervensi yang tidak sah. Selain itu, pemilu juga harus diselenggarakan secara berkala, dengan periode waktu yang jelas antara setiap pelaksanaan pemilu. Pemilu yang terjadwal dengan baik memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih kembali pemimpin mereka dalam waktu yang teratur, sehingga proses demokrasi tetap berjalan dengan lancar.

Selain itu, pemilu harus inklusif, yang berarti memberikan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi tanpa adanya diskriminasi. Pemilu yang inklusif akan mengakomodasi beragam kelompok dalam masyarakat, baik dari segi sosial, etnis, agama, maupun gender. Pemilih dalam pemilu juga harus memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya.

Suasana yang bebas dari tekanan dan ancaman menjadi sangat penting, sehingga pemilih dapat menentukan pilihannya sesuai dengan kehendak hati nurani mereka. Pemilu juga harus dilaksanakan oleh penyelenggara yang independen, tidak berpihak pada kepentingan tertentu, dan memiliki integritas yang terjamin.

Partai politik memainkan peran yang sangat penting dalam sistem perpolitikan sebuah negara. Sebagai pilar demokrasi, partai politik menjadi wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dalam pemilu, seperti yang terlihat pada penyelenggaraan pemilu tahun 2004, membuktikan bahwa partai politik berperan besar dalam menentukan jalannya demokrasi. Pemilu tersebut dianggap sukses, baik oleh masyarakat Indonesia maupun komunitas internasional, dan menjadi salah satu indikator keberhasilan sistem perpolitikan nasional. Sistem politik yang stabil dan berfungsi dengan baik di Indonesia tentu tidak terlepas dari kontribusi partai politik yang menjalankan peranannya dengan baik.

Kualitas dan kapasitas partai politik sangat menentukan kualitas demokrasi dalam suatu negara. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat terus ditingkatkan, maka hal ini dapat membawa dampak positif bagi sistem politik negara, menghasilkan kepemimpinan yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas partisipasi politik rakyat. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kapasitas dan kualitas partai politik di semua level agar mereka dapat lebih efektif dalam mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat. Selain itu, hal ini juga akan mendukung terwujudnya demokrasi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Pada saat ini, Indonesia tengah menyelesaikan beberapa paket undang-undang di bidang politik untuk menyongsong pemilu tahun 2009. Salah satu undang-undang yang sudah diselesaikan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu serta menguatkan sistem politik yang lebih demokratis.

Pemilu di Indonesia, sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, bertujuan untuk memilih pemimpin yang dapat mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan

berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, pemilu tidak hanya diharapkan menghasilkan presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota legislatif serta kepala daerah yang mampu memperjuangkan kepentingan rakyat. Hal ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.

Pelaksanaan pemilu yang demokratis sangat penting agar setiap warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih berhak untuk memberikan suaranya sekali, dan setiap suara memiliki nilai yang sama, sesuai dengan prinsip "one person, one vote, one value" (opovov). Dalam sistem pemilu yang langsung, rakyat memberikan suaranya tanpa perantara, dengan kebebasan penuh untuk memilih sesuai dengan kehendak hati nurani mereka.

Selain itu, pemilu yang bersifat umum harus menjamin kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk memilih, tanpa adanya diskriminasi. Pemilu yang bebas mengharuskan setiap pemilih memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Keamanan pemilih juga sangat penting, agar mereka dapat memilih dengan rasa aman sesuai dengan kehendak pribadi. Pemilu yang bersifat rahasia juga menjamin bahwa setiap pilihan pemilih tidak dapat diketahui oleh pihak manapun.

Penyelenggaraan pemilu yang efektif dan berkualitas membutuhkan penyelenggara yang profesional, independen, dan memiliki integritas tinggi. Setiap pihak yang terlibat dalam pemilu, mulai dari penyelenggara, pengawas, hingga pemilih, harus mematuhi aturan yang berlaku dan menjaga prinsip kejujuran serta transparansi. Pemilu yang berkualitas memastikan adanya kompetisi yang sehat, keterwakilan yang tinggi, dan pertanggungjawaban yang jelas dari setiap pihak yang terlibat dalam proses pemilu.

Namun, sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia masih belum sepenuhnya menciptakan pemerintahan yang kuat dan efektif. Oleh karena itu, perlu adanya sistem kepartaian yang lebih sederhana dan lebih terorganisir agar dapat menciptakan stabilitas politik yang lebih baik. Dalam sistem kepartaian yang sederhana, fragmentasi politik dapat diminimalisir, sehingga keputusan-keputusan pemerintahan dapat diambil dengan lebih cepat dan efisien.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh sistem politik Indonesia adalah jumlah partai politik yang terlalu banyak, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapai mayoritas di parlemen. Banyaknya partai politik yang ada di parlemen juga menambah kerumitan dalam pengambilan keputusan. Untuk menciptakan pemerintahan yang lebih stabil, diperlukan koalisi yang lebih permanen antara partai-partai politik yang memiliki platform politik yang jelas dan program yang disepakati bersama.

Sistem koalisi yang terbentuk saat ini seringkali bersifat instan dan lebih didasarkan pada kepentingan politik jangka pendek, tanpa adanya komitmen jangka panjang atau platform politik yang jelas. Oleh karena itu, penting untuk mendorong terbentuknya koalisi yang lebih permanen di antara partai-partai politik, yang didasarkan pada kesepakatan politik yang lebih solid. Koalisi yang permanen akan membantu memperkuat pemerintahan dan memastikan kestabilan politik yang lebih terjaga.

Selain itu, sistem rekrutmen dan seleksi partai politik di Indonesia juga perlu diperbaiki. Persyaratan untuk membentuk partai politik yang relatif mudah menyebabkan banyaknya partai politik yang muncul, namun banyak di antaranya tidak memiliki basis dukungan yang kuat atau ideologi yang jelas. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk menyederhanakan jumlah partai politik agar sistem kepartaian menjadi lebih efektif dan kredibel.

Pemahaman mengenai hubungan antara sistem kepartaian dan sistem pemerintahan menjadi sangat penting, terutama dalam konteks masa transisi politik. Jika sistem kepartaian terfragmentasi dan tidak memiliki keterikatan yang kuat, hal ini dapat menyebabkan deadlock politik dan kesulitan dalam mencapai kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Dalam situasi seperti ini, reformasi sistem kepartaian sangat diperlukan agar dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan demokratis.

Pemilu yang berkualitas dapat tercapai jika sistem kepartaian yang ada didukung oleh partai-partai yang memiliki organisasi yang terstruktur dengan baik. Pelembagaan partai politik merupakan salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas partai politik. Dengan sistem partai yang lebih kokoh dan terorganisir, partai politik dapat berfungsi dengan lebih baik dalam menyerap dan mengakomodasi kepentingan rakyat. Pelembagaan partai meliputi penguatan pada struktur internal partai, pembentukan aturan dan regulasi yang jelas, serta peningkatan daya saing partai di arena politik.

Partai politik yang kuat harus dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif, baik dalam konteks pemerintahan maupun dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Selain itu, partai politik juga harus memperjuangkan aspirasi rakyat dan memberikan perlindungan bagi kepentingan konstituennya. Dengan demikian, partai politik berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan rakyat.

Namun, banyak partai politik di Indonesia yang belum terlembaga dengan baik. Sistem kepartaian di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya struktur organisasi partai, kurangnya pengkaderan, serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Untuk mengatasi hal ini, partai politik harus melakukan reformasi internal untuk memperbaiki sistem rekrutmen dan pengkaderan, serta meningkatkan kualitas pengelolaan partai di semua tingkatan.

Penguatan partai politik sangat penting, terutama di tingkat pusat dan akar rumput. Di tingkat akar rumput, partai politik harus membangun kedekatan dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka, dan memberikan pendidikan politik yang baik. Di tingkat pusat, partai politik harus dapat menyusun strategi politik yang matang, serta memiliki kemampuan dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Jika partai politik dapat menjalankan perannya dengan baik, maka sistem kepartaian yang kuat dapat tercipta. Sistem kepartaian yang kuat akan menciptakan stabilitas politik, memperkuat demokrasi, dan mendukung keberhasilan pemerintahan. Hal ini tentu saja membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu dan proses politik yang berjalan.

Faktor Penghambat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan partisipasi pemilu di masyarakat wilayah Sumatra Utara

Partisipasi masyarakat dalam politik merujuk pada keterlibatan individu atau kelompok dalam kegiatan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memengaruhi keputusan pemerintah dan kebijakan publik. Secara tradisional, bentuk partisipasi ini meliputi tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri pertemuan politik, bergabung dengan partai politik atau kelompok kepentingan, serta melakukan pendekatan atau membangun hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota legislative (Saebani, 2008).

Selama ini, partisipasi masyarakat seringkali dipandang sebagai upaya untuk menggerakkan masyarakat demi kepentingan pemerintah atau negara. Namun, seharusnya partisipasi yang ideal adalah ketika masyarakat terlibat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah, yang berfungsi sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Partisipasi politik seharusnya berjalan harmonis ketika proses politik berlangsung dalam kondisi stabil. Seringkali, hambatan dalam partisipasi politik muncul karena stabilitas politik yang belum tercapai, sehingga penting bagi para pemegang kekuasaan untuk mengupayakan terciptanya stabilitas politik. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk mewujudkan pelembagaan politik, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan aspirasi dan cita-cita mereka.

Di banyak negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dianggap sebagai simbol dan ukuran dari demokrasi itu sendiri. Pemilu menjadi indikator utama dalam negara demokratis, karena di dalamnya rakyat memiliki hak untuk menggunakan suaranya, menentukan pilihannya secara langsung, dan bebas. Pemilu bukan hanya sekadar kegiatan politik, tetapi juga merupakan sarana penting dalam merealisasikan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, pemilu berfungsi sebagai mekanisme yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk turut berperan dalam menentukan arah kebijakan negara.

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum juga mencerminkan semakin kokohnya tatanan demokrasi di suatu negara. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah hal yang tak terhindarkan. Rakyat memiliki peran yang sangat penting dalam demokrasi, karena demokrasi itu sendiri didasarkan pada prinsip persamaan dan gagasan bahwa pemerintah harus memperoleh persetujuan dari rakyat yang diperintah. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemilu, keterlibatan masyarakat adalah elemen yang tidak dapat dipisahkan, mengingat pemilu merupakan sarana untuk mengekspresikan kehendak rakyat dalam bentuk keputusan politik yang sah.

Secara lebih luas, konsep ini juga sejalan dengan pandangan bahwa negara merupakan manifestasi dari kehendak Tuhan di bumi, yang diwujudkan melalui aspirasi dan suara rakyat. Dalam kerangka ini, pemilihan umum (pemilu) berfungsi sebagai alat vital yang memastikan bahwa kehendak dan aspirasi masyarakat benar-benar terwakili

dalam setiap proses pengambilan keputusan politik yang akan memengaruhi masa depan negara. Pemilu bukan hanya sekadar proses formal atau mekanisme pemilihan pemimpin, tetapi lebih dari itu, ia menjadi saluran yang sah dan demokratis bagi rakyat untuk mengekspresikan pilihan mereka, baik dalam memilih wakil mereka di lembaga legislatif maupun dalam menentukan pemimpin negara yang dianggap mampu membawa perubahan sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam hal ini, penyelenggaraan pemilu harus dipahami sebagai bentuk nyata implementasi dari prinsip-prinsip demokrasi yang dipegang oleh negara. Demokrasi itu sendiri menciptakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam menentukan arah kebijakan publik dan memilih kepemimpinan yang akan membawa negara ke masa depan yang lebih baik. Lebih dari sekadar hak, partisipasi dalam pemilu juga mencerminkan tanggung jawab setiap warga negara untuk ikut serta dalam proses pembangunan negara. Keterlibatan masyarakat dalam pemilu, baik dalam memilih calon pemimpin maupun dalam mengawal jalannya pemilu itu sendiri, pada akhirnya menjadi cermin dari kedewasaan demokrasi yang dimiliki oleh suatu negara.

Masyarakat yang aktif dalam pemilu menunjukkan tingkat kesadaran politik yang tinggi, serta kematangan dalam memahami pentingnya peran mereka dalam proses pembuatan keputusan negara. Oleh karena itu, pemilu bukan hanya sekadar mekanisme elektoral untuk memilih pemimpin, tetapi juga menjadi indikator sejauh mana sebuah negara telah berhasil menciptakan sistem demokrasi yang inklusif, transparan, dan representatif. Keterlibatan yang maksimal dalam pemilu mengarah pada terwujudnya pemerintahan yang lebih akuntabel dan mampu mendengarkan suara rakyat, serta membawa kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Pada akhirnya, partisipasi aktif rakyat dalam pemilu mencerminkan kedewasaan dan kematangan demokrasi, yang tidak hanya tercermin dalam jumlah pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara, tetapi juga dalam kualitas pemilihan yang mencerminkan aspirasi rakyat yang seutuhnya.

Ketika membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu, fenomena golput (golongan putih) menjadi salah satu aspek yang tidak bisa diabaikan, yaitu golongan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Fenomena ini selalu ada dalam setiap pemilihan umum, dan meskipun jumlah golput dianggap sehat jika berada di kisaran 30 persen, seringkali jumlah golput melampaui angka tersebut, bahkan ada

yang mencapai 40 persen atau lebih. Menurut Eep Saefulloh Fatah, yang mengutip tulisan Muh Isnaini, golput dapat diklasifikasikan dalam empat golongan. Pertama, golput teknis, yaitu mereka yang tidak dapat hadir ke tempat pemungutan suara karena alasan teknis tertentu atau yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah. Kedua, golput teknis-politis, yaitu mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan diri sendiri atau pihak lain seperti penyelenggara pemilu. Ketiga, golput politis, yaitu mereka yang merasa tidak memiliki pilihan dari kandidat yang tersedia atau merasa tidak ada perubahan yang akan terjadi melalui pemilu. Keempat, golput ideologis, yaitu mereka yang tidak percaya pada mekanisme demokrasi atau yang tidak ingin terlibat dalam sistem tersebut karena alasan ideologi atau fundamentalisme agama.

Faktor penyebab seseorang tidak menggunakan hak pilihnya dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Faktor pertama adalah faktor teknis, yang mencakup berbagai kendala pribadi yang menghalangi seseorang untuk hadir pada saat pencoblosan. Contohnya adalah ketika seorang pemilih sedang sakit, memiliki kegiatan lain yang lebih mendesak, atau sedang berada di luar daerah. Bahkan, ada pula kasus di mana seseorang tidak dapat memilih karena pekerjaannya yang mengharuskan dia berada di luar negeri atau merantau. Kondisi semacam ini menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu. Faktor kedua adalah faktor politik, yang berkaitan dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kandidat yang ada atau ketidakpercayaan bahwa pemilu akan membawa perubahan atau perbaikan. Berbagai berita negatif tentang politisi atau konflik-konflik internal partai yang sering terjadi dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pemilu. Ketidakpercayaan terhadap partai politik atau penyelenggaraan pemilu yang dianggap tidak akan membawa dampak positif juga menjadi faktor pendorong golput.

Selanjutnya, faktor sosialisasi juga memegang peranan penting dalam mengurangi angka golput. Sosialisasi atau penyebaran informasi tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat diperlukan untuk meminimalisir golput. Hal ini menjadi semakin penting mengingat tingginya intensitas pemilu di Indonesia, mulai dari pemilihan kepala dusun hingga pemilihan presiden. Setiap pemilu yang diadakan, terutama di era reformasi, selalu diikuti oleh peserta yang berbeda-beda, yang menuntut penyelenggara pemilu, partai politik, dan seluruh stakeholder untuk terus

menyebarkan informasi secara massif kepada masyarakat. Melalui sosialisasi yang baik, masyarakat akan lebih memahami pentingnya partisipasi mereka dalam pemilu dan bagaimana mereka dapat menggunakan hak pilih mereka secara maksimal.

Faktor lainnya yang juga sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah faktor administrasi, yang mencakup berbagai masalah teknis administratif yang dapat menghalangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik. Salah satu masalah administrasi yang sering terjadi adalah ketidaklengkapan atau ketidaktepatan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Meskipun seseorang secara fisik memenuhi syarat untuk memilih, seperti sudah mencapai usia yang ditentukan dan bukan bagian dari kategori yang dilarang memilih, mereka mungkin tidak terdaftar dalam DPT karena adanya masalah administratif. Hal ini menyebabkan individu tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya, meskipun mereka sebenarnya layak dan ingin berpartisipasi. Masalah ini sering kali muncul karena kesalahan dalam proses pendataan, atau keterlambatan dalam pembaruan data pemilih yang terus berkembang.

Selain itu, adanya kendala terkait identitas kependudukan juga menjadi salah satu faktor yang menghambat partisipasi. Sebagai contoh, seseorang yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah atau identitas kependudukan yang valid lainnya, akan kesulitan untuk terdaftar sebagai pemilih, padahal secara substansial mereka memenuhi persyaratan. Ketidaklengkapan administrasi kependudukan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembaruan data atau administrasi kependudukan secara tepat waktu. Di sisi lain, masalah lain yang kerap muncul adalah terkait dengan keakuratan data kependudukan itu sendiri. Data kependudukan yang tidak valid atau tidak sesuai, seperti adanya data ganda atau ketidaksesuaian alamat, dapat menjadi penghalang serius bagi seseorang untuk terdaftar dalam DPT atau bahkan dapat menyebabkan mereka terdaftar di lebih dari satu tempat pemungutan suara. Contohnya, seorang pemilih yang telah pindah domisili namun belum memperbarui data kependudukannya atau seseorang yang tercatat di dua tempat berbeda karena memiliki dua identitas yang tidak dicabut atau diperbarui.

Keakuratan data ini sangat penting karena data yang tidak valid atau bermasalah akan berdampak langsung pada tingkat partisipasi pemilih. Apabila data pemilih tidak

diperbarui secara akurat, maka potensi adanya kesalahan dalam pencocokan data pemilih dengan DPT akan semakin besar. Dalam beberapa kasus, hal ini bisa berujung pada penghilangan hak suara atau ketidakmampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam pemilu, meskipun mereka memiliki hak tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa data kependudukan dan DPT yang digunakan dalam pemilu benar-benar akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pemerintah dan instansi terkait juga harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembaruan data kependudukan dan identitas pribadi, serta memastikan adanya mekanisme yang efisien dan transparan dalam pengelolaan data pemilih. Dengan memperhatikan masalah administrasi ini dengan seksama, maka tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu dapat dimaksimalkan, dan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dapat dihargai dan dilindungi.

Secara keseluruhan, berbagai faktor yang telah dibahas sebelumnya memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap proses pemilihan umum. Salah satu elemen utama yang mempengaruhi tingkat partisipasi adalah kualitas dan validitas data pemilih yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu. Data pemilih yang akurat dan mutakhir sangat penting agar setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat terdaftar dengan benar, sementara mereka yang tidak berhak tidak tercatat. Selain itu, sosialisasi yang efektif juga memegang peranan yang tidak kalah pentingnya. Upaya-upaya untuk menyebarkan informasi mengenai pemilu, mulai dari cara menggunakan hak pilih dengan benar hingga pentingnya partisipasi dalam menentukan arah bangsa, perlu dilakukan secara masif dan terus-menerus. Sosialisasi yang baik tidak hanya akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mekanisme pemilu, tetapi juga akan menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk ikut serta dalam proses demokrasi.

Tidak kalah pentingnya adalah penanganan masalah teknis dan politik yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Penanganan masalah teknis yang efisien, seperti pengaturan jadwal pemilu yang jelas, kelancaran distribusi surat suara, serta penggunaan teknologi yang tepat untuk memastikan keamanan dan transparansi dalam proses pemilu, akan sangat membantu meminimalisir kesalahan dan kecurangan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum. Sementara itu, masalah politik, seperti polarisasi yang berlebihan, ketegangan antar

kelompok politik, atau ketidakpercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu, juga harus ditangani dengan bijaksana agar tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk memilih. Jika berbagai hambatan ini dapat diatasi secara tepat dan menyeluruh, maka harapan untuk menurunkan angka golongan putih (golput) dan mendorong tingkat partisipasi yang lebih tinggi akan semakin besar.

Dengan adanya langkah-langkah yang terencana dan terkoordinasi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, masyarakat akan semakin merasa bahwa hak pilih mereka sangat berharga dan memiliki dampak yang besar terhadap masa depan negara. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas demokrasi, menciptakan pemerintahan yang lebih representatif, dan menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat luas. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, baik pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, maupun masyarakat itu sendiri, untuk saling berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif di setiap pemilu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Peran DPW PKB Kota Medan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, karena pendidikan politik lebih fokus pada kader partai, sementara untuk masyarakat masih kurang, ditambah sosialisasi mengenai money politics yang perlu lebih diperhatikan. 2) Faktor penghambat partisipasi DPW PKB Kota Medan meliputi kendala teknis, faktor politik, kurangnya sosialisasi untuk mengurangi golput, serta masalah administrasi yang menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfani, R. N. (2008). *Demokrasi Indonesia Kontemporer*. Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press.
- Asshidqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI.
- Budiarjo, M. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pusaka Utama.
- Fadjar, A. M. (2012). *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Setara Press.

- Firmasyah. (2011). *Mengelola Partai Politik Komunikasi Dan Positioning Idiologi Politik Di Era Demokrasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fuady, A. S. (2020). Relevansi Pemikiran Pendidikan Mohammad Hatta Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 101–118. <https://doi.org/10.22236/jpi.v11i2.5719>
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. PT Ghalia Indonesia.
- Pamungkas, S. (2019). *Partai Politik :Teori dan praktinya di Indonesia*. institute fordemocracy and welfarism.
- Rosyida, D. (2003). *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*. ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kerjasama The Asia Foundation & Pernada Media.
- Saebani, B. A. (2008). *Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*. CV Pustaka Setia.